

Jurnal ETAP, Volume. 2 Nomor 2 Tahun  
**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
KEUANGAN TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN OKU**

**Sefti Rosita Sari<sup>1</sup>**

[septirosita4139@gmail.com](mailto:septirosita4139@gmail.com)

**Prodi Akuntansi Universitas Baturaj**

**Hasiatul Aini<sup>2</sup>**

[hasiatulaini181107@gmail.com](mailto:hasiatulaini181107@gmail.com)

**Prodi Akuntansi Universitas Baturaja**

### **ABSTRACK**

*The purpose of this study was to examine the influence of accountability and transparency of financial management on agency performance. The analytical method used is multiple linier regression analysis, hypothesis testing and coefficient of determination. The data used are primary data, the questionnaires distributed to Regional Secretariat of OKU Regency, then the data processing and analysis method using the SPSS IBM 26.*

*The results of this study that partially accountability and transparency of financial management have a significant influence on the performance of the Regional Secretariat of OKU Regency. Simultaneous results of partial accountability and transparency of financial management have a significant influence on the performance of the Regional Secretariat of OKU Regency. The adjusted value of the coeffecient of thge determination show that the contribution of accountability and transparency of financial management is 60,8%, while 30,2% influenced by other variables not included in this study.*

***Keywords: Accountability, Transparency, Agency Performance***

### **PENDAHULUAN**

Masyarakat menuntut pemerintah mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Hal ini dijelaskan dalam dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang lebih nyata. Implementasi otonomi daerah ini mendapat sambutan dengan adanya pengesahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004tentang Perimbangan Pusat dan Daerah. Undang-undang ini melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan

otonomi daerah yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan

bertanggungjawab pada daerah (Damayanti, 2018).

Secara konseptual otonomi daerah sejalan dengan demokrasi lokal, otonomi diberikan kepada kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam wilayah negara. Dengan adanya kebijakan otonomi, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab besar terhadap pengelolaan keuangan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Kebijakan yang diberikan pemerintah pusat diharapkan dapat memandirikan daerahnya masing-masing. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus melakukan berbagai cara dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yaitu dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku secara umum. Dengan meningkatkan

Jurnal ETAP, Volume. 2 Nomor 2 Tahun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengaplikasiannya diperlukan sistem pengembangan sebagai alat transparansi untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparan, efektif, dan efisien serta akuntabel.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten OKU adalah untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan pengelolaan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan rencana aturan dan tujuan yang telah ditetapkan secara transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pertanggungjawaban terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan data dari Sekretariat daerah Kabupaten OKU, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten OKU pada Tahun 2018-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Sekretariat Daerah 2018-2020**

Tahun	Pendapatan		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	730.716.000,00	373.000.000,00	51,05
2019	620.000.000,00	382.862.500,00	61,75
2020	300.000.000,00	163.065.000,00	54,36
Tahun	Belanja		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	56.290.297.077,00	50.024.251.157,43	88,87
2019	66.842.971.200,00	58.459.932.894,00	87,46
2020	47.187.594.839,00	42.207.044.317,00	89,45

*Sumber: Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten OKU 2018-2020*

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan dari tahun 2018-2020 mengalami mengalami kenaikan dan penurunan (*fluktuatif*). Pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapatan sebesar 51,05%, dan pada tahun berikutnya realisasi anggaran pendapatan naik menjadi 61,75%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 54,36%. Sedangkan, realisasi belanja pada tahun 2018 sebesar 88,87%, lalu pada tahun berikutnya realisasi anggaran turun sebesar 87,46%, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 sebesar 89,45%. Fluktuatif sendiri diduga terjadi karena masih belum optimalnya efektivitas anggaran yang berfokus pada belanja langsung terhadap program kegiatan.

Akuntabilitas Keuangan yang berkualitas perlu didukung dengan unsur pengawasan yang baik. Berikut tabel 1.2 dapat dilihat hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Tahun 2019-2020.

**Tabel 2**  
**Laporan Kinerja Instansi**  
**Pemerintah Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten OKU 2019-2020**

Tahun	Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)/SAKIP	
	Target	Realisasi
2019	B	C
2020	B	C

*Sumber: Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU 2019-2020*

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten OKU pada tahun 2019 dan 2020 masih memperoleh nilai C dari target B. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten OKU untuk dapat

menyajikan laporan kinerja instansi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU secara parsial maupun bersama-sama.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Akuntansi sektor publik mencakup peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang telah dilakukan. Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang memiliki ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasinon profit lainnya (Bastian, 2006:19).

### ***Good Governance***

Menurut Mardiasmo (2018:22-23) Pengertian Governance dapat

diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Governance* merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa memformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah *good governance* (tata-kelola pemerintahan yang sehat) atau model yang tak sehat (buruk/nista), sebuah model atau tata-kelola pemerintahan tak sehat- *bad governance* (Dwipayana dan Eko, 2003 dalam Syakrani, 2009:122).

### **Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

### **Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Menurut Krina (2003) pada tahap sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga

yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil bila sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan
4. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa
6. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
7. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

### **Transparansi**

Salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan adalah transparansi. Menurut Mardiasmo (2004:30) dalam Suwanda dkk (2019:51) Transparansi

berarti *openness* pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas manajemen sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

### **Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan**

Menurut Krina (2003) indikator –indikator transparansi yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab.
2. Kemudahan akses informasi merupakan aspek yang terfokus pada bentuk dari sumber-sumber informasi yang diberikan.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media dan lembaga non pemerintah.

### **Kinerja Instansi**

Menurut Mahsun (2013:25) Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja organisasi adalah sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2005:329).

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi**

Menurut Atmosoeparto (2001) dalam Aryani (2018) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal seperti berikut.

1. Faktor eksternal yang terdiri dari:
  - a. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal,

- b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat, daya beli, untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar, dan
- c. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang ditengah masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

2. Faktor internal yang terdiri dari:
  - a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi,
  - b. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.

- c. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
- d. Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

#### **Indikator Kinerja Instansi**

Menurut Mahsun (2013:77-78).terdapat beberapa indikator dalam kinerja organisasi ialah sebagai berikut:

*a) Masukan (input)*

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM dan sumber daya yang dimiliki.

*b) Proses (process)*

Sebuah organisasi merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat

akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi beratibesarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah masukan. Sedangkan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya dan waktu yang telah ditentukan untuk itu.

*c) Keluaran (output)*

Sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

*d) Hasil (Outcomes)*

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcomes menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang

lebih tinggi yang mungkin mencangkup kepentingan banyak pihak.

e) Manfaat (*Benefit*)

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut akan dirasakan setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten OKU. Penelitian ini menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner (angket) kepada responden yang dapat menggambarkan tentang variabel yang diteliti yaitu pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten OKU

## **Metode Analisis**

### **Analisis Kuantitatif**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang dilakukan sebanyak tiga macam yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Ini dikarenakan pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data kuesioner murni.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan umumnya (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini teknik analisis data



menggunakan program SPSS. Untuk mempermudah melakukan perhitungan secara sistematis, penelitian ini diolah menggunakan program SPSS 26.

Rumus persamaan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU
- X<sub>1</sub> = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
- X<sub>2</sub> = Transparansi Pengelolaan Keuangan
- b<sub>1</sub> = Koefisien regresi akuntabilitas
- b<sub>2</sub> = Koefisien regresi transparansi
- a = Konstanta
- e = error

### Uji Hipotesis

Menurut kuncoro (2013:59) hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, keadaan tertentu yang terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta

merupakan pernyataan secara spesifik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Asumsi Klasik

- a. Berdasarkan Hasil dari output menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,181 > 0,05 atau diatas 0,05 hal ini berarti H<sub>0</sub> diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.
- b. Dari hasil output diatas dapat diketahui *Varian Inflating Factor* (VIF) kedua variabel, yaitu Akuntabilitas dan Transparansi adalah 1,827 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance dari kedua variabel independen sebesar 0,547 lebih besar dari 0,01 sehingga bisa diduga bahwa antar variabel independen tidak terjadi masalah multikoleniaritas.
- c. Berdasarkan pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada

mode regresi. Sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat (Y) berdasarkan masukan variabel bebas yaitu X1 dan X2.

**2. Persamaan Regresi Linier Berganda**

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 3,161 + 0,371 X_1 + 0,563 X_2 + e$$

Persamaan regresi linier diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai 3,161 yang berarti jika akuntabilitas (X<sub>1</sub>) dan transparansi (X<sub>2</sub>) bernilai 0 maka kinerja instansi (Y) sebesar 3,161 satuan.
2. Koefisien regresi untuk akuntabilitas sebesar 0,371 berarti bahwa jika akuntabilitas (X<sub>1</sub>) meningkat 1 satuan, maka kinerja instansi (Y) akan meningkat sebesar 0,371 satuan dengan asumsi variabel transparansi (X<sub>2</sub>) tetap.
3. Koefisien regresi untuk transparansi (X<sub>2</sub>) sebesar 0,563 berarti bahwa jika transparansi (X<sub>2</sub>) meningkat 1 satuan, maka kinerja instansi (Y)

akan meningkat sebesar 0,563 satuan dengan asumsi variabel akuntabilitas (X<sub>1</sub>) tetap.

**3. Uji Hipotesis**

**a. Uji Parsial (t)**

**Tabel 3**  
**Uji Parsial (Uji t)**

Variabel bebas	t-tabel	t-hitung	sig
Akuntabilitas	4,502	1,993	0,000
Transparansi	4,049	1,993	0,000

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat pada tabel 3 diperoleh :

1. Nilai t-hitung akuntabilitas (X<sub>1</sub>) sebesar 4,502 dengan t-tabel sebesar 1,993 maka t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 4,502 > 1,993. Sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima (uji sisi kanan). Kesimpulannya ada pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU.

**b. Uji Bersama- sama (Uji F)**

**Tabel 4**  
**Uji Bersama-sama (Uji F)**

F- hitung	F-tabel	Sig
55.883	3,12	0,000

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan hasil regresi berganda dari tabel 4 menunjukkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $55,883 > 3,12$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas ( $X_1$ ) dan transparansi

pengelolaan keuangan ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU (Y).

**c. Koefisien Determinasi**

**Tabel 5**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 <sup>a</sup>	.608	.597	5,26735
a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas				
b. Dependent Variable: Kinerja Instansi				

Sumber: Data Diolah 2021

Berdasarkan tabel 5 diperoleh dari koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,725. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) dan transparansi ( $X_2$ ) pengelolaan keuangan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU (Y) sebesar  $0,608 \times 100\% = 60,8\%$ , sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini misalnya faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial (Atmosoeperto, 2001 dalam Aryani, 2018).

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ( $X_1$ ) Terhadap Kinerja Sekretariat daerah Kabupaten OKU (Y)**

Berdasarkan hasil analisis secara parsial variabel akuntabilitas memiliki  $t_{hitung} (4,502) > t_{tabel} (1,993)$  maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU. Menurut Mardiasmo (2018:19) akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintah, laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik hendaknya dipahami bukan sekedar akuntabilitas finansial saja, akan tetapi juga akuntabilitas *value for money*, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik.

Akuntabilitas juga diwujudkan dalam bentuk sejauh mana strategi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan program kerja dan kebijakan yang telah dijalankan. Dalam hal kinerja pengelolaan keuangan, peran lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting untuk menilai akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapat penilaian baik akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas lebih diarahkan untuk meningkatkan kinerja daripada memenuhi kebijakan tertentu dalam peraturan perundangan (Forbes *et al.*, 2006 dalam Suwanda dkk, 2019:44). Berdasarkan pernyataan di atas responden setuju bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan memberikan pengaruh terhadap peningkatan

kinerja instansi Sekretariat Daerah Kabupaten OKU.

Hasil penelitian ini didukung juga dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Auditya dkk (2013) tentang “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu”. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Penelitian ini mendapatkan hasil secara parsial bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu.

#### **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan (X<sub>2</sub>) Terhadap Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU (Y).**

Berdasarkan analisis secara parsial variabel kedua transparansi memiliki t-hitung (4,049) > t-tabel (1,993) maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Artinya bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU. Teori yang sejalan dengan penelitian ini dikemukakan oleh Krina (2003) transparansi adalah prinsip yang

menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Perkembangan teknologi informasi juga merambah ke sektor pemerintah. Pemerintah yang dilakukan dengan media teknologi informasi sering disebut sebagai *e-government*. Transparansi pemerintah bisa dilakukan melalui media *e-government* dengan membuat sebuah situs. Situs (*website*) menjadikan pemerintah daerah mudah berkomunikasi dengan masyarakat dan lingkungan eksternal.

Suatu situs merupakan alat komunikasi yang unggul yang menggambarkan budaya dan daya tanggap pemerintah daerah kepada

masyarakat (Patrick, 2007; Deakins *et al.*, 2010 dalam Suwanda dkk, 2019:44). Dengan memperluas saluran transparansi yang ada selama ini di Sekretariat daerah Kabupaten OKU maka pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat sehingga tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah kabupaten OKU dapat lebih baik. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten OKU mampu memberikan pengaruh dalam peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU, terutama dalam hal informasi kepada publik. Hal ini mengidentifikasi bahwa dengan adanya prinsip transparansi pengelolaan keuangan atas keterbukaan informasi kepada publik akan menjadikan organisasi memiliki kinerja yang baik.

Hasil penelitian ini didukung juga dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti (2018) tentang “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan

Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa, semakin baik transparansi yang diterapkan oleh pemerintah SKPD Kota Surabaya, maka kinerja pemerintah semakin meningkat.

**Pengaruh Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan ( $X_2$ ) Terhadap Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU (Y)**

Secara simultan  $F_{hitung}$  sebesar 55,883. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan  $F_{tabel}$ , pada tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha = 5\%$  didapat  $F_{tabel}$  3,12. Jadi  $F_{hitung}$  55,883 >  $F_{tabel}$  3,12 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya secara simultan ada pengaruh signifikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten OKU. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,608. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU sebesar 60,8%, sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini misalnya faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial (Atmosoeparto, 2001 dalam Aryani, 2018). Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan daerah di era kebijakan saat ini mengarah pada otonomi ke berbagai bidang, membutuhkan pola akuntabilitas publik melalui pembangunan sistem akuntansi pemerintah, memberikan peluang peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolok ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan proses pertanggungjawaban (*stewardship and accountability process*), manajerial dan unsur pengendalian

manajemen di pemerintah daerah (Suwanda dkk, 2019:44).

Hasil penelitian ini didukung juga dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulya dan Astuti (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kab. Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat dan Lurah Kab Tegal)”. Metode penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dari Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah ternyata mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

Dan penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Umar dkk (2018) tentang “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Inspektorat Aceh”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil

penelitiannya membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja Instansi Inspektorat Aceh.

Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan dan laporan kinerja dengan cara mampu menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat menilai apakah pemerintah telah melaksanakan kinerjanya secara ekonomis, efisien dan efektif.

Semakin baik bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat maka akan semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah pun menjadi wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik sehingga menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Informasi yang memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi yang artinya semakin mudah masyarakat

memperoleh informasi tentang program penyelenggaraan pemerintah, maka praktik penyelenggaraan pemerintah tersebut dapat dinilai memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji akuntabilitas ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU.
2. Hasil uji transparansi ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU.
3. Kontribusi kedua variabel akuntabilitas dan transparansi 60,8%, sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini misalnya faktor

politik, faktor ekonomi dan faktor sosial (Atmosoeparto, 2001 dalam Aryani, 2018).

### **Saran**

Berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kabupaten OKU agar selalu melakukan perbaikan pengelolaan APBD dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu berprinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
2. Sekretariat daerah kabupaten OKU perlu memperbaiki pelatihan dan pembinaan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Auditya, Husnaini dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap



- Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal fairness*. Volume 3, Nomor 1, 2013:21-41. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/fairness/article/view/15274/0> (04 oktober 2020).
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta:Erlangga.
- Damayanti, Evi. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. e-ISSN : 2460-0585. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/97/95/&ved>(04 oktober 2020)
- Aryani, Miha 2018. “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja organisasi” <https://www.dictio.id/t/faktor-faktor-apa-saja-yang-mempengaruhi-kinerja-organisasi/117055>. (23 Januari 2021)
- Firdaus, Muhammad. 2019. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Edisi Ketiga. Jakarta:Bumi Aksara.
- Ghozali, Ratmono. 2017. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan Eviews* 10. Edisi Kedua. Semarang:Undip.
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Bappenas, Jakarta.<https://docplayer.info/125452-Indikator-alat-ukur-prinsip-akuntabilitas-transparansi-partisipasi-disusun-oleh-dra-loina-lalolo-krina-p.html>(06 oktober 2020).
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi terbaru. Yogyakarta:Andi.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

- .....2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suwanda, Junjunan, Affandi dan Rusliati. 2019. *Manajemen Resiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Syakrani, Syahriani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Syamrin. 2015. *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. Edisi IFRS. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ulya dan Astuti. 2018. Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol.13 No.2. <https://publikasiilmiah.unwah.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3242>(04 oktober 2020).
- Umar, Syawalina dan Khairunnisa. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Jurnal Akuntansi*. Vol.6, No 2. Desember 2018 <https://osf.io/9yzk7/download&ved> (07 oktober 2020)
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Edisi ke lima. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.